

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan yang didalamnya terdapat indikator *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Nett Profit Margin* (NPM) terhadap Nilai Perusahaan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel pemoderasi yang didalamnya terdapat indikator Komisaris Independen, Dewan Komisari, Dewan Direksi dan Komite Audit. Hasil dari penelitian yang digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan antara lain :

Tabel 2.1  
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Suklimah Ratih (2011)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel <i>Intervening</i> Pada Perusahaan Peraih <i>The Indonesia Most Trusted Company</i> —CGPI	V.Independen: GCG V.Dependen: NP V.Intervening: KK	Porpositive Sampling	Menunjukkan bahwa variabel Intervening KK mampu berpengaruh signifikan dengan <i>Return on Asset</i> sebagai Indikator	Persamaan: Menunjukkan bahwa <i>Return On Asset</i> juga mampu mendongkrak Nilai Perusahaan dengan baik.  Perbedaan: Obyek Penellitian
2	Maria Fransisca Widyati (2013)	Analisis Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial Dan	V.Independen:Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Instutional	Random Sampling	Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Instutional secara simultan berpengaruh	Persamaan: Menunjukkan bahwa secara simultan Indikator GCG berpengaruh terhadap Kinerja

		Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan.	V.Dependen: Kinerja Keuangan		terhadap Kinerja Keuangan	Keuangan Perbedaan: Hanya menggunakan 2 Variabel
3	Fitri Romadhon dan Isanalita (2013)	Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Struktur <i>Corporate Governance</i> Terhadap Praktik <i>Intellectual Capital Disclosure</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ-45 Periode 2012-2013.	V.Independen: GCG V.Dependen: <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	Porpositive Sampling	profitabilitas, leverage, likuiditas, tipe industri, ukuran komite audit dan komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan.	Persamaan: Sama-sama menggunakan variabel GCG Sebagai variabel independen Perbedaan: Hasil Penelitian yang tidak sama
4	Suhadak, Topowijono	Pengaruh Penerapan	V.Independen:GCG V.Dependen:Kinerja	Cluster Sampling	Tidak ada Pengaruh GCG Secara	Persamaan: Sama-sama

	(2015)	<i>Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Real Estate &amp; Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013).</i>	Keuangan		Simultan Terhadap Kinerja Keuangan	menggunakan Obyek Perusahaan dari Bursa Efek Indonesia  Perbedaan:  Hasil Penelitian
5	Nurmaria Rahmatika, Kirmizi & Restu Agusti (2015)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i> Yang Ditunjukkan Oleh Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban dan Kewajaran Terhadap Kinerja	V.Independen:GCG  V.Dependen:Kinerja Keuangan	Non Probability Sampling	Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggung Jawaban dan Kewajaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	Persamaan:  Menggunakan GCG Sebagai Variabel Independen  Perbedaan:  Indikator dalam GCG menggunakan : Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas,

		Keuangan (Studi Pada PT Angkasa Pura II). Penelitian Ini Mengambil Objek PT Angkasa Pura II				Pertanggung Jawaban dan Kewajaran
6	Eka (2011)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008	V.Independen: GCG V.Dependen: Kinerja Keuangan	Non Probability Sampling	Tidak ada pengaruh signifikan variabel GCG terhadap Kinerja keuangan	Persamaan: Sama-sama menggunakan Variabel GCG sebagai Variabel Independen  Perbedaan: Hasil Penelitian

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Sinyal (Signaling Theory)**

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar (investor, kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan.

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk et al, 2000).

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain (Sari dan Zuhrohtun, 2006).

### **2.2.2 Teori Kontingensi (Contingency Theory)**

Teori kontingensi mula-mula diperkenalkan oleh Lawrence dan Lorsch (1967) kemudian dipakai oleh Katz dan Rosenzweig (1973) yang menyatakan bahwa tidak ada cara terbaik dalam mencapai kesesuaian antara faktor organisasi dan lingkungan untuk memperoleh prestasi yang baik bagi suatu organisasi. Menurut Sari (2006) dalam Azli dan Azizi (2009), teori kontingensi merupakan suatu teori yang cocok digunakan dalam hal yang mengkaji reka bentuk, perancangan, prestasi dan kelakuan organisasi serta kajian yang berkaitan dengan pengaturan strategik. Menurut Rayburn dan Thomas (1991) dalam Azli dan Azizi (2009), teori kontingensi menyatakan pemilihan sistem akuntansi oleh pihak manajemen adalah tergantung pada perbedaan desakan lingkungan perusahaan. Teori ini penting sebagai media untuk menerangkan perbedaan dalam struktur organisasi. Variabel yang sering dipakai dalam bidang ini adalah organisasi, lingkungan, teknologi, cara pembuatan keputusan, ukuran perusahaan, struktur, strategi, dan budaya organisasi (Rayburn, Fisher dan Thomas, 1991), serta ketidakpastian teknologi, industri, misi dan strategi kompetitif, observabilitas (Fisher, 1999).

Dalam konteks penelitian ini akan digunakan variabel kontingen GCG untuk melihat pengaruhnya terhadap hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. GCG dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Menurut Daniri (2008), GCG dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda dunia. Agar krisis

tidak terulang kembali maka dikembangkan sistem dan struktur pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Penerapan GCG mewajibkan suatu perusahaan menerapkan struktur dan sistem tertentu. Dalam kaitannya dengan struktur, perusahaan diwajibkan menciptakan perangkat organisasi tertentu (seperti komisaris independen, komite audit, komite remunerasi) untuk menjalankan fungsi spesifik, sedangkan dalam hal sistem, manajemen perusahaan diwajibkan mengikuti proses atau aturan tertentu dalam pengambilan keputusan dan dalam menjalankan kegiatannya secara umum.

### **2.2.3 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

*Agency theory* (teori agensi) istilah agen dalam hal ini. Adalah pihak manajemen/direksi perusahaan, Kebanyakan perusahaan-perusahaan yang *go public* di manage oleh pihak profesional yang bukan sebagai pemegang saham mayoritas. Kendatipun dalam kenyataannya ada kepemilikan saham oleh pihak manajemen/direksi, porsinya relative kecil dan kebanyakan diperoleh dari kebijakan saham bonus. Teori Keagenan dibangun sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang muncul dalam hubungan antara prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan) dengan agen (manajemen dan karyawan) (Gudono, Teori Organisasi, 2012:147-155).

Dikemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi masalah keagenan (Masdupi, 2005 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, XX (1)). Pertama; dengan meningkatkan *insider ownership*. Perusahaan meningkatkan bagian kepemilikan manajemen untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan



pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Meningkatnya persentase kepemilikan, manajer menjadi termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Kedua; dengan pendekatan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui penggunaan hutang. Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi penggunaan saham sehingga meminimalisasi biaya keagenan ekuitas. Akan tetapi, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayarkan beban bunga secara periodik. Selain itu penggunaan hutang yang terlalu besar juga akan menimbulkan konflik keagenan antara *shareholders* dengan *debtholders* sehingga memunculkan biaya keagenan hutang. Ketiga; *institutional investor* sebagai *monitoring agent* dalam bentuk distribusi saham dari luar yaitu *institutional investor* dan *shareholders dispersion* dapat mengurangi biaya keagenan ekuitas (*agency cost*). Hal ini disebabkan karena kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang keberadaan manajemen, maka konsentrasi atau penyebaran *power* menjadi suatu hal yang relevan dalam perusahaan.

Salah satu cara untuk mengurangi konflik antara agen dan prinsipal ini adalah melalui pengungkapan informasi manajemen (agen), dimana sejalan dengan berkembangnya *Corporate Governance* (CG) diharapkan agen dapat bekerja memenuhi permintaan parsipal sehingga dapat meningkatkan perhatian terhadap masalah pengungkapan pada aspek *Corporate Governance* (CG) itu sendiri. *Corporate Governance* (CG) merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara

manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Corporate Governance* (CG) memberikan struktur yang dapat memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran pada perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. *Corporate Governance* (CG) sangat berkaitan dengan investor dimana manajer mampu memberikan keuntungan kepada investor

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Agency theory* (teori agensi) dalam *Good Corporate Governance* pada hakikatnya adalah sebuah konsep yang tidak memiliki definisi tunggal yaitu suatu hubungan lebih dari satu orang sebagai pemisah fungsi dan wewenang serta tanggung jawab, sehingga peneliti harus menginterpretasikan sendiri berdasarkan konsep-konsep yang sudah ada.

#### **2.2.4 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menggambarkan tentang bagaimana susunan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan memperoleh sumber kekayaan tersebut dan juga untuk melihat perkembangan perusahaan, hal ini akan menunjukkan manajemen telah mengelola perusahaannya dengan baik. Menurut Darsono dan Ashari (2005:4) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut: "Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang disebut dengan siklus akuntansi. Laporan keuangan menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan selama satu periode." Sedangkan menurut Myers yang dikutip oleh Munawir (2004:5), menyatakan bahwa: "Laporan

keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan.

Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Pada akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak dibagikan (laba ditahan).” Menurut Sugiyarso (2006:1) laporan keuangan adalah:”Merupakan daftar ringkasan akhir transaksi keuangan organisasi yang menunjukkan kegiatan operasional organisasi dan akibatnya selama tahun buku yang bersangkutan.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan keuangan, yang merupakan pencerminan dari prestasi manajemen perusahaan pada suatu periode tertentu untuk alat informasi keuangan perusahaan dan komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut.

#### **2.2.4.1 Tujuan dan Kegunaan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*Progress Report*) secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bersangkutan. Harahap (2004:132) menyatakan tujuan laporan keuangan berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva

netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.

3. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pengguna laporan dalam menafsir potensi perubahan dalam menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.
5. Memberikan informasi tentang sejauh mana pengungkapan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pengguna laporan, seperti informasi mengenai kebutuhan akuntansi yang dianut perusahaan.

Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (Sawir, 2005:2) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan disusun untuk mengetahui kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau Pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang dapat diandalkan

mengenai kekayaan perusahaan, kewajiban perusahaan, laba perusahaan, dan informasi lain yang sesuai atau relevan dengan keputusan para pemakainya.

#### **2.2.4.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

Jenis laporan keuangan utama dan pendukung, menurut Harahap (2004:106) adalah sebagai berikut :

##### **1. Neraca**

Daftar Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu.

##### **2. Laporan Laba Rugi**

Perhitungan laporan laba-rugi menggambarkan jumlah hasil biaya dan laba-rugi perusahaan.

##### **3. Laporan Sumber dan Penggunaan dana**

Disini dimuat sumber dan pengeluaran perusahaan selama satu periode.

##### **4. Laporan Aliran Arus Kas**

Laporan aliran arus kas disini menggambarkan sumber penggunaan kas dalam satu periode.

##### **5. Laporan Harga Pokok Produksi**

Laporan harga pokok produksi disini menggambarkan berapa dan unsur apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. Dalam hal tertentu harga pokok produksi (HPPd) ini disatukan dalam laporan harga pokok penjualan (HPP)  $HPP = PPd + \text{Persediaan awal} - \text{persediaan akhir}$ .

#### 6. Laporan Laba Ditahan

Laporan laba ditahan menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham.

#### 7. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal ini menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan.

### **2.2.5 Kinerja Keuangan**

Kinerja adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu perusahaan. Sedangkan kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2007). Tujuan manajemen adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus memanfaatkan keunggulan dari kekuatan perusahaan dan secara terus menerus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Salah satu caranya yaitu mengukur kinerja keuangan dengan menganalisa laporan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola perusahaan untuk memperbaiki kinerja pada periode berikutnya dan dijadikan landasan pemberian *reward* dan *punishment* terhadap manajer dan anggota organisasi. Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah

dicapai perusahaan dan menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen serta mampu menciptakan nilai perusahaan itu sendiri kepada para *stakeholder*.

Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mempertahankan kebijakan deviden untuk mengukur prestasi perusahaan dan menggunakan modal secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan.

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Bagi sebuah perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu keharusan agar saham tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002:4) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi.
- b) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.

- c) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan akan menjadi pedoman dan tolak ukur seorang investor saat melakukan jual beli saham. Salah satu alat pengambilan keputusan yang andal dan bermanfaat yaitu dengan melihat laporan keuangan, dengan demikian laporan keuangan haruslah memiliki kandungan informasi yang bernilai tinggi bagi penggunanya

Kinerja keuangan dapat dikatakan baik jika dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia, yaitu :

- 1) Relevan, artinya disesuaikan dengan kebutuhan pemakai dan disesuaikan bukan kebutuhan khusus pihak tertentu.
- 2) Dapat dimengerti, artinya laporan tersebut dapat dipahami sesuai dengan batas pemakai informasi; yang memuat aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi dan istilah-istilah lain yang digunakan dalam laporan keuangan.
- 3) Objektif artinya laporan tersebut dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
- 4) Netral, artinya laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan pihak tertentu saja.
- 5) Tepat waktu artinya laporan keuangan yang disampaikan harus tepat waktu, agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu pengambilan



keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan bagi pemakai.

- 6) Dapat dibandingkan artinya laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama maupun perusahaan yang sejenis pada periode yang sama.
- 7) Lengkap, artinya laporan yang disajikan harus memuat data-data akuntansi yang memenuhi sekurang-kurangnya 6 persyaratan tersebut di atas.

#### **2.2.5.1 Pengukuran Kinerja Keuangan**

Alat Ukur kinerja keuangan perusahaan dengan cara mengevaluasi data akuntansi berupa laporan keuangan. Untuk mengevaluasi data akuntansi dapat menggunakan rasio-rasio finansial yang dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas. Penilaian kinerja keuangan dengan mengevaluasi laporan keuangan yaitu dengan menggunakan rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2012:196). Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Sofyan Safri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, 2011:304). Pendapat lain mengatakan Rasio yang

mengukur efektivitas secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan, 2011:135).

Dengan demikian rasio profitabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan peningkatan penjualan dan menekan biaya-biaya yang terjadi. Selain itu, rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh dana yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Analisis rasio profitabilitas sangat berpengaruh untuk menentukan nilai seberapa bagus tingkat laba suatu perusahaan. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada *Return On Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Nett profit margin* (NPM):

1. Return On Asset (ROA)=(laba bersih setelah pajak)/(Total aset)x100%.

*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang (Irham Fahmi 2011:137).

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity* (ROE) disebut juga laba atas *equity*. Dalam beberapa referensi disebut juga dengan rasio *total asset turnover* atau perputaran total asset (Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan 2011:137). Rasio ini

menilai sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. *Return On Equity* dapat dilihat dari laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas. *Return On Equity* yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan kedepannya. Sebaliknya *Return On Equity* yang rendah menunjukkan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang tidak baik, sehingga investor kurang tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan bersangkutan.

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

3. *Net Profit Margin* (NPM) merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan atau dengan kata lain rasio pendapatan bersih perusahaan atas penjualan (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2012:200). Rasio ini bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) diperusahaan tertentu.

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

### 2.2.6 Nilai Perusahaan

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain:

- a. Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
- b. Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham, Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
- c. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai real suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
- d. Nilai buku, adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
- e. Nilai likuidasi itu adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan likuidasi.

Berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan antara lain kepemilikan manajerial, kinerja keuangan suatu perusahaan, kebijakan deviden, *corporate governance* dan lain sebagainya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan Machfoedz (2003) mengacu pada penelitian-

penelitian terdahulu menyatakan bahwa nilai perusahaan akan lebih tinggi ketika direktur memiliki bagian saham yang lebih besar. Minguez and Francisco (2000) yang melakukan penelitian tentang struktur kepemilikan terhadap perusahaan-perusahaan publik Spanyol mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2006) menemukan bahwa kebijakan dividen memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Siallagan (2006) juga menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governanc* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang diperoleh. Suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaannya. Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga saham di pasar.

Penelitian ini menggunakan Tobin's Q sebagai variabel dari nilai perusahaan. Tobin's Q atau Q ratio atau Q Teori adalah rasio atau teori yang pada tahun 1969 diperkenalkan pertama kali oleh James Tobin. James Tobin adalah seorang ekonom Amerika yang sukses mendapatkan nobel dalam bidang ekonomi dengan hipotesisnya, nilai pasar dari suatu perusahaan seharusnya sama dengan biaya ganti aktiva perusahaan tersebut sehingga terciptalah keadaan yang ekuilibrium (Haosana, 2012:31).

Tobin's Q juga menjelaskan bahwa nilai dari suatu perusahaan merupakan nilai kombinasi dari aktiva berwujud dengan aktiva tak berwujudnya. Nilai Tobin's Q untuk perusahaan yang rendah yaitu antara 0 sampai 1 menunjukkan

bahwa biaya penggantian aktiva perusahaan lebih besar dibandingkan dengan nilai pasar perusahaan tersebut yang berarti pasar menilai kurang perusahaan tersebut. Nilai Tobin's Q untuk perusahaan yang tinggi yaitu lebih dari 1 menunjukkan bahwa nilai perusahaan lebih besar dibandingkan dengan nilai aktiva perusahaan yang tercatat yang berarti masih ada beberapa aktiva perusahaan yang tidak terukur atau tercatat. Rumus Tobin's Q menyebutkan bahwa nilai perusahaan diukur melalui Tobin's Q yang diformulasikan (dengan satuan persentase) :

$$\frac{(CP \times \text{Jumlah Saham}) + TL + I - CA}{TA}$$

Dimana :

Tobins Q = Nilai perusahaan

CP = Closing Price

TL = Total Liabilities

I = Inventory

CA = Current Assets

TA = Total Assets

## **2.2.7 Good Corporate Governance (GCG)**

### **2.2.7.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)**

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan lainnya

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (*Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), 2001:2)

Definisi yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah *Corporate governance is the system by which business corporations are directed and control. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholder, and spells out the rule and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.* Didalam bahasa indonesia dapat diartikan bahwa Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah Tata kelola perusahaan yaitu sistem dimana perusahaan bisnis diarahkan dan dikontrol. Struktur tata kelola perusahaan menentukan pembagian hak dan tanggung jawab antara peserta yang berbeda dalam perusahaan, manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan merinci aturan dan prosedur untuk membuat keputusan tentang urusan perusahaan. Dengan melakukan ini, juga menyediakan struktur melalui mana tujuan perusahaan ditetapkan, dan cara mencapai tujuan tersebut dan pemantauan kinerja.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperlihatkan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Berdasarkan beberapa definisi dapat diambil kesimpulan bahwa *Corporate Governance* (CG) merupakan sistem yang dibuat untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan suatu hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) demi mencapai tujuan organisasi. *Corporate Governance* (CG) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam mengelola perusahaan untuk menjaga hubungan dan kepentingan *stakeholder* yang nantinya mampu memberikan nilai tambah pada perusahaan.

#### **2.2.7.2 Prinsip *Corporate Governance* (CG)**

*Corporate Governance* (CG) adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan yang menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab/mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham.

Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang



pemangku kepentingan, yang menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan

Sepuluh Prinsip Good Governance Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) (<http://knkg-indonesia.com/home/news/93-10-prinsip-good-governance.html>) adalah :

1. Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
3. Daya Tanggap: Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. Efisiensi & Efektivitas: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab.
6. Transparan: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
7. Kesetaraan: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

8. Wawasan Ke Depan: Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Penegakan Hukum: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Pedoman GCG 2006 : 5-7).

a) Transparansi (*Transparency*)

Prinsip Dasar :

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar :

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

- e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c) *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip Dasar :

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d) *Independensi (Independency)*

Prinsip Dasar :

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- e) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip Dasar :

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

- b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Dapat diambil kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) terdiri dari dua unsur, yaitu unsur internal dan eksternal (Diaryintan, wordpress.com, 2010)

#### 1. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c) Manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
- d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

- e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

## 2. Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:

- a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b) Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik / lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).

1. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.



2. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.

Dengan demikian *Good Corporate Governance* (GCG) akan mampu memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional dan mendorong pengelolaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organisasi.

### **2.2.7.3 Manfaat *Corporate Governance* (CG)**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakan *Corporate Governance* sesuai dengan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) disebutkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.

- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *Corporate Value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan *dividen*.

### **2.2.8 Pengukuran Corporate Governance (CG)**

Implementasi pengukuran *corporate governance* dalam penelitian ini akan diukur dari 4 aspek yaitu: Komisaris Independen, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit yang secara lengkap akan dijelaskan pada uraian berikut ini:

#### **2.2.8.1 Komisaris Independen**

Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja pada Emiten dan Perusahaan Publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir namun berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik, tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik, tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan

kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Disebutkan dalam Penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah “Komisaris dari pihak luar”. Permasalahan dalam penerapan *Corporate Governance* (CG) adalah *chief executive officer* (CEO) memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris padahal fungsi komisaris adalah untuk mengawasi kinerja *chief executive officer* (CEO). Efektifitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan tingkat kekuatan *chief executive officer* (CEO) sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris.

#### **2.2.8.2 Dewan Komisaris**

Dewan komisaris lebih berfokus fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Dewan komisaris sangat berperan dalam meminimalisir permasalahan agensi yang muncul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Tugas Utama Dewan Komisaris adalah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Komisaris namun keputusan pemberian nasihat dilakukan atas nama Komisaris secara kolektif. Dalam hal ini Dewan komisaris mempunyai dua wewenang yaitu Pertama; wewenang preventif, Di dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan wewenang Dewan komisaris untuk memberikan

persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat 1 UU PT No 40 Tahun 2007). Kedua; Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 UU PTNo 40 Tahun 2007).

### **2.2.8.3 Dewan Direksi**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi merupakan pengurus Perseroan yang bertindak Perseroan. Dengan kata lain, Direksi merupakan Dewan Direktur yang terdiri dari satu atau beberapa orang Direktur. Oleh karena itu, salah satunya Dewan Direksi menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur sedangkan yang lain menjadi Direktur atau Wakil Direktur.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, bila keputusan RUPS tidak mengaturnya maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Berdasarkan Pasal 97 Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dewan Direksi merupakan mekanisme praktek *Corporate Governance* (CG), dimana keberadaan Dewan Direksi menentukan kinerja perusahaan.

#### **2.2.8.4 Komite Audit**

Menurut Peraturan Bapepam tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Nomor IX.1.5 tahun 2004 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa: “Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya”

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit sengaja dibentuk oleh dewan komisaris untuk bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Salah satu tugasnya yaitu memastikan efektivitas sistem pengendalian intern. Selain itu, komite audit juga bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001):

1. Laporan keuangan (*financial reporting*) adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang.

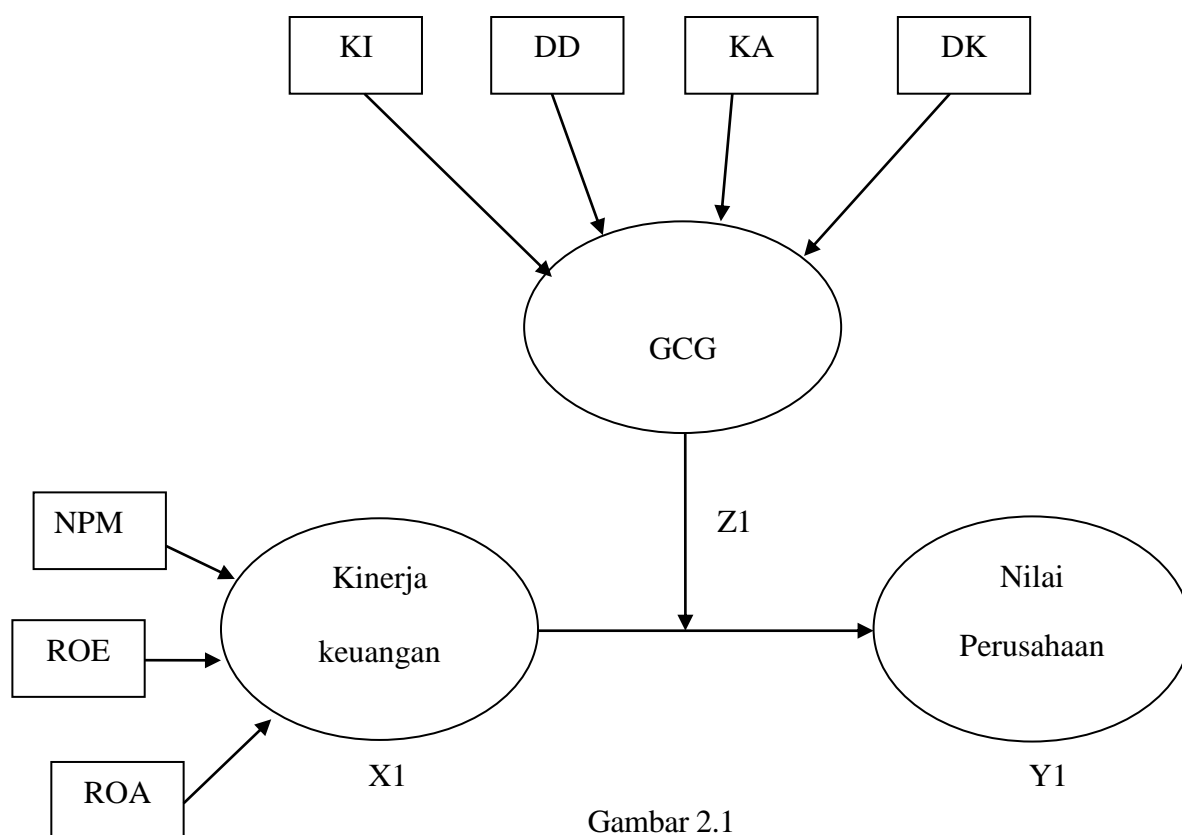
2. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*), adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan tugasnya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan
3. Pengawasan perusahaan (*corporate control*). Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan system pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas system pengawasan intern.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Dasar teori yang telah diuraikan dan penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan terdapat berbagai faktor untuk mengukur kinerja keuangan. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015 yang diukur dengan pemoderasi GCG

dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen dan komite audit. Sedangkan untuk kinerja keuangan diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM). Dan nilai perusahaan diukur Tobin's Q menggunakan rasio Sehingga kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran Teoritis

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2012:64). Sejumlah penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti

terdahulu tentang Good Corporate Governance yang dikaitkan dengan Kinerja Keuangan. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dengan sub bab pengaruh antar variabel penelitian yaitu :

H1 : Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Nilai perusahaan pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015

H2 : Pengungkapan *Good corporate governance* berpengaruh terhadap Kinerja keuangan dan Nilai perusahaan pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015